



BEDAH IPSAS 22

PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN SEKTOR KEPEMERINTAHAN UMUM

Studi Mandiri Jan Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Rapat pleno KSAP meminta kami menjadi penanggungjawab Proyek PSAP tentang Informasi Keuangan mengambil hikmah IPSAS 22, dan makalah ini adalah laporan studi mandiri atau naskah akademis penanggungjawab proyek tersebut. Makalah dibatasi kedangkalan pengamatan yang pemakalah akan hal-hal yang dianggap penting, sebagai berikut. LK konsolidasian pemerintahan mengonsolidasi hanya entitas kendalian, sementara GGS mencakupi LK yang tidak terkonsolidasi

TUJUAN DAN ALASAN IPSAS 22

Alasan penerbitan IPSAS 22:

- Sistem Perakunan Nasional 1993 dan Sistem Perakunan Eropa 1995 mewajibkan pemerintah melakukan kompilasi¹ informasi sektor pemerintahan umum (*General Government Sector, GGS*) menjadi Pelaporan Keuangan Berbasis Statistik (PKBS).
- Info GGS terkait fungsi utama pemerintahan, aktifitas utama pemerintahan.

- IPSAS mewajibkan LK dan LK Konsolidasian pemerintahan mencakupi seluruh sumber daya terkendali entitas.
- IPSAS mewajibkan pengungkapan segmen, sebuah aktifitas atau serumpun aktifitas pada sebuah entitas pemerintahan yang layak dilaporkan terpisah dalam LK entitas tersebut.
- IPSAS 22 adalah jembatan pelaporan berbasis statistik.

FITUR UTAMA IPSAS 22:

- IPSAS 22 menjelaskan kewajiban penyiapan dan penyajian informasi GGS, terkait LK sendirian pemerintahan dan LK Konsolidasian pemerintahan.
- Standar tidak mengizinkan entitas pelaporan mengkonsolidasi informasi berbagai entitas yang bukan entitas kendalian.
- Pengungkapan GGS berlaku bagi semua IPSAS, kecuali IPSAS 6.
- IPSAS 6 mewajibkan konsolidasi paripurna semua entitas, IPSAS 22 mewajibkan korporasi sektor keuangan dan korporasi publik non keuangan (PFC dan PNFC) disajikan sebagai pos investasi.

TUJUAN IPSAS 22

- Menjelaskan kewajiban pengungkapan tentang GGS dalam LK Konsolidasian.
- Informasi GGS menyebabkan pembaca LK Konsolidasian lebih memahami hubungan aktifitas pasar dan aktifitas bukan pasar dari pemerintahan.
- Informasi GGS menjelaskan hubungan LK dan Pelaporan Keuangan Berbasis Statistik (PKBS)ⁱⁱ.

RUANG LINGKUP IPSAS 22

- LK konsolidasian entitas pemerintahan, misalnya LKPP NKRI, berbasis akrual.
- Entitas LK Konsolidasian memilih melaporkan informasi keuangan tentang GGS.
- GGS mencakupi entitas nirlaba, yang bertugas untuk aktifitas non pasar, kelangsungan hidup entitas tergantung dari alokasi APBN/D.
- PKBS juga menyajikan sektor korporasi pemerintahan yaitu korporasi keuangan sektor publik, korporasi non keuangan sektor publik, dan sektor publik lain, terkait paragraf 19 dan 20 IPSAS 22.
- LK konsolidasian mengonsolidasi hanya entitas kendalian, sementara GGS mencakupi LK yang tidak terkonsolidasi.

LAPORAN SEGMENT

- IPSAS 18 mewajibkan pengungkapan aktifitas penyampaian layanan publik dan sumber daya terkait aktifitas tersebut.

Tidak seperti sektor sektor dilaporkan berbasis PKBS, segmen segmen dilaporkan sesuai IPSAS 18 tidak berdasar pembedaan aktifitas pasar dan bukan pasar.

- Pengungkapan segmen terkait IPSAS 18 tidak boleh diganti (*replace*) oleh informasi GGS dalam LK.

PKBS BERTUJUAN

- Menyajikan informasi berbantuan analisis dan evaluasi kebijakan fiskal.
- Menjelaskan kegiatan penyampaian layanan publik berdasar sumber daya dialokasikan, menjelaskan hubungan GGS dengan sektor-sektor korporasi.
- Menjelaskan hubungan (*link*) antara LK berbasis SAP dan informasi keuangan berbasis PKBS, memungkinkan rekonsiliasi informasi antar dua laporan tersebut. IPSAS 24 tentang Penyajian Informasi Anggaran dalam LK

mewajibkan LK pemerintahan mencakupi perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran pada basis (dasar) pembuatan anggaran, misalnya anggaran berbasis kas. Bila anggaran pemerintah disajikan untuk GGS, informasi keuangan tentang GGS wajib disajikan sesuai IPSAS 22.

KEBIJAKAN AKUNTASI

- Pengungkapan informasi GGS dalam LK pemerintah ditentukan oleh masing masing pemerintahan itu sendiri, misalnya oleh KSAP NKRI.
- Pengungkapan GGS dalam LK harus sesuai IPSAS 22, harus memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, antara lain dapat dipahami, relevan, handal dan berdaya banding.

DEFINISI

- Sektor pemerintahan umum (*general government sector*) mencakupi semua entitas organisasional dari pemerintahan umum seperti didefinisikan dalam PKBS.
- Perusahaan bisnis pemerintah adalah entitas berkarakteristik sbb:
 - ✓ Entitas dapat melakukan perjanjian hukum atas nama entitas sendiri
 - ✓ Entitas mendapat tugas untuk melaksanakan aktifitas bisnis tertentu dari pemerintah
 - ✓ Entitas menjual barang atau jasa dalam tatanan bisnis lazim, untuk tujuan laba atau pemulihan biaya (*cost recovery*).
 - ✓ Entitas harus mandiri, mempunyai kesinambungan usaha, tidak tergantung pada pendanaan pemerintah (injeksi APBN/D).

PERUSAHAAN BISNIS PEMERINTAH (GBE)

- GBE mencakupi perusahaan perdagangan, perusahaan infrastruktur atau utilitas, perusahaan keuangan misalnya lembaga keuangan.

- GBE tidak berbeda dengan entitas lain disektor privat.
- GBE beroperasi dengan tujuan laba.
- GBE mungkin dirancang untuk suatu pasar terbatas, pelanggan terbatas dan layanan terbatas, sesuai instuksi pemerintah atau maksud pendirian GBE.
- GBE memberi/menyajikan produk atau jasa layanan publik dengan atau tanpa imbalan, atau berimbalan sesuai tarif komersial atau lebih rendah dari tarif komersial pasar bebas.
- Sektor pemerintahan umum :
 - ✓ Sektor publik mencakupi sektor GGS pada sektor PFC, dan sektor PNFC, dan sektor lain yang diidentifikasi untuk kebutuhan analisis statistik
 - ✓ GGS terdefinisi dalam SNA 93 mencakupi
- Semua unit pemerintahan sentral (pusat), Negara (*state*) dan pemerintahan lokal (negara bagian, Kabupaten mandiri). Dana jaminan sosial (*Social Security Fund*) pada tiap tingkat pemerintahan.
- Lembaga nirlaba nirpasar terkendali oleh suatu unit pemerintahan, misalnya kementerian.
- Kegiatan operasional entitas tersebut didanai dari apropriasi atau alokasi APBN/D seperti berbagai jenis pajak, pendapatan dividen dari korporasi pemerintahan (BUMN), pendapatan (*revenue*) lain lain dan pinjaman (*borrowings*).
- GGS mencakupi entitas Department Pemerintahan (K/L), pengadilan, lembaga pendidikan publik (PT Negeri), unit penjagaan kesehatan publik (BPJS) dan berbagai agen pemerintahan.
- GGS tidak mencakupi PFC dan PNFC.



PERUSAHAAN KEUANGAN TERKENDALI PEMERINTAH (PFC)

- Sektor PFC mencakupi :
 - ✓ Korporasi keuangan terkendali pemerintah.
 - ✓ Korporasi kuasi.
 - ✓ Lembaga nirlaba yang melakukan intermediasi dan layanan keuangan untuk pasar, termasuk bank BUMN dan bank sentral.

PERUSAHAAN NON-KEUANGAN TERKENDALI PEMERINTAH (PNFC)

- Sektor PNFC mencakupi :
 - ✓ Korporasi bukan keuangan terkendali pemerintah.
 - ✓ Korporasi kuasi dan lembaga nirlaba memproduksi barang dan jasa bukan keuangan untuk pasar, misalnya perusahaan air minum, perusahaan sampah, perusahaan listrik.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

- Informasi keuangan tentang GGS harus diungkapkan dalam keselarasan dengan kebijakan akuntansi terpilih dalam IPSAS, untuk menyajikan LK konsolidasian pemerintah, kecuali (1) entitas tidak menerapkan IPSAS 6 terkait entitas dalam PFC dan NFCS publik, (2) GGS harus mengakui investasi dalam sektor PFC dan sector public NFCS sebagai suatu aset dan harus memertanggungjawabkan aset tersebut pada nilai terbawa (*carrying value*) aset neto investee.
- IPSAS 22 membiaskan pandangan bahwa LK pemerintahan konsolidasian yang secara sengaja memilih mengungkapkan informasi GGS dipisahkan untuk menyajikan GGS sebagai sebuah sektor dalam entitas pelaporan pemerintahan. Taat asas dengan pandangan ini, IPSAS 22 mewajibkan pengakuan, pengukuran, penyajian yang diterapkan dalam pembuatan LK Konsolidasian, harus diterapkan pada pengungkapan GGS, dengan sebuah perkecualian, yaitu kewajiban bahwa IPSAS 6 tidak diterapkan dalam kaitan dengan sektor GGS dengan entitas sektor PFC dan sektor PNFC.
- IPSAS 6 mewajibkan entitas pengendali membuat LK Konsolidasian entitas kendalian pada basis lini demi lini. IPSAS 6 mengandung rincian konsep pengendalian sector publik, dan memberi pedoman penentuan apakah pengendalian ada (*exsist*). Konsisten dengan kewajiban pada IPSAS 6, entitas sektor PFC dan PNFC terkendali pemerintah, walau membuat PKBS, LK PFC & PNFC dikonsolidasi dalam LK pemerintah tersebut.
- PKBS menggambarkan dampak GGS pada sektor publik secara keseluruhan, terkait SNA 93 dan pemutahirannya, pada sebuah perekonomian nasional.
- Disamping itu, PKBS juga menyajikan entitas sektor publik diluar sektor tersebut diatas, sebagai investasi kepada sektor sektor lain. Transaksi dari GGS dengan entitas sektor lain tidak di eliminasi dari laporan operasional pemerintahan, sesuai paragraf 28.
- Karena itu, dalam megungkapkan informasi keuangan tentang GGS, saldo dan transaksi **antar entitas dalam GGS** di eliminasi sejalan dengan IPSAS

6. Namun demikian, saldo dan transaksi antar entitas dalam GGS dan entitas sektor lain tidak di eliminasi.

- IPSAS 22 meminta sektor GGS mengakui investasi pada sektor PFC atau PNFC **pada nilai terbawah aset neto entitas tersebut**. Hal ini akan menjamin bahwa pengungkapan GGS membiaskan pemisahan (*disagregasi*) informasi keuangan yang tersaji dalam LK konsolidasian pemerintahan, sebagai sebuah bagian. Sejalan dengan *disagregasi* tersebut pada LK konsolidasian pemerintahan, perubahan nilai terbawah aset neto berbagai entitas tersebut akan diakui dengan cara yang sama sebagaimana mereka diakui dalam LK konsolidasian sebuah pemerintahan. Pelaporan keuangan berbasis statistik (PKBS) seluruh aset dan liabilitas, kecuali pinjaman (*loans*) harus direvaluasi pada nilai pasar pada tiap tanggal pelaporan. IPSAS mencakupi kewajiban pengukuran berbeda, meminta atau mengizinkan nilai biaya (*cost*) dan nilai sekarang (*current values*) untuk kelas kelas tertentu aset dan liabilitas. Tidak ada kewajiban bahwa seluruh aset dan kewajiban dinilai kembali (*revalued*) ke nilai pasar.



PEMISAHAN (DISAGREGASI) SELANJUTNYA

- Pada berbagai Negara, Pemerintah pusat mengendalikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berkonsekuensi LKPP mengonsolidasi berbagai tingkat (*level*) pemerintahan tersebut.
- Bila LK mengonsolidasi berbagai tingkatan pemerintahan tersebut diatas, *disagregasi* LK lebih lanjut akan muncul dalam kaitan dengan IPSAS 22, untuk mengungkapkan informasi secara terpisah tentang GGS pada tiap tingkat (*level*) pemerintahan tersebut.
- Tidak ada kewajiban *disagregasi* lebih lanjut pada IPSAS 22. Namun demikian, secara sukarela *disagregasi* boleh disajikan untuk membantu pembaca LK memahami lebih baik LK Konsolidasian berbasis IPSAS dan berlandaskan PKBS.
- *Disagregasi* diungkapkan berdasarkan kelas beban, yaitu klasifikasi ekonomi dari beban atau *Klassification of Function of Government (COFOG)* sesuai IPSAS 18 (38)

PENGUNGKAPAN

- Pengungkapan terkait GGS paling sedikit mencakupi :
 - a. Kelompok besar aset, investasi pada sektor lain diungkapkan terpisah.
 - b. Kelompok besar liabilitas.
 - c. Asst neto atau ekuitas.
 - d. Kenaikan/penurunan hasil revaluasi, pengakuan langsung pendapatan/beban pada aset neto/ekuitas.
 - e. Kelompok besar pendapatan.
 - f. Kelompok besar beban (*expenses*).
 - g. Surplus atau defisit.
 - h. Kelompok besar arus kas dari aktifitas operasional.

- i. Kelompok besar arus kas dari aktifitas investasi.
 - j. Kelompok besar arus kas dari aktifitas pendanaan (*financing*).
- Entitas pembuat pengungkapan GGS harus mengungkapkan
 - ✓ Kedudukan penting entitas pengendali didalam konsep GGS.
 - ✓ Perubahan entitas dari periode LK lalu.
 - ✓ Penjelasan mengapa entitas tersebut yang semula termasuk dalam GGS, dikeluarkan, terkait butir 40.
 - ✓ Sebaliknya, pengungkapan perubahan **entitas pengendali** termasuk dalam GGS memungkinkan pengguna LK memantau hubungan LK pengendali dan informasi GGS lintas waktu.

REKONSILIASI KEPADA LK KONSOLIDASIAN

- Pengungkapan GGS direkonsiliasi terhadap LK Konsolidasian Pemerintah, menunjukkan secara terpisah jumlah penyesuaian (*adjustment*) untuk setiap butir (*item*) LK yang setara (*ekuivalen*).
- Entitas menyajikan terpisah penyesuaian jumlah investasi aset pada sektor PFC dan PNFC sesuai paragraf 23, penyesuaian (*adjustment*) diungkapkan terpisah sesuai paragraf 35.
Entitas boleh (tidak wajib) menyajikan secara terpisah jumlah suaian (*adjustment*) setiap butir (*item*) teratribusi kepada sektor PFC dan PNFC. Rekonsiliasi merupakan tata cara pertanggungjawaban keuangan negara secara lebih baik.

REKONSILIASI KEPADA PKBS

- PKBS memperlakukan deviden sebagai beban (*ekspensis*) sedang IPSAS memperlakukan deviden sebagai distribusi.

- LKPS melaporkan dan melakukan pembedaan antara aliran transaksi dan aliran ekonomi lain untuk penyajian informasi keuangan, yang tidak digambarkan oleh LK konsolidasian. PKBS digunakan untuk analisis kebijakan fiskal, peminjaman (*landing*) neto, pinjaman (*borrowing*) neto surplus kas atau defisit kas.
- IPSAS 22 tidak mewajibkan rekonsiliasi pengungkapan GGS dalam LK konsolidasian dengan pengungkapan GGS pada PKBS, dengan pertimbangan – keprihatinan tentang kepraktisan, biaya dan masalah.

CONTOH BENTUK PENGUNGKAPAN (*DISCLOSURE*) BERBASIS *GENERAL GOVERNMENT STATISTICS*

Berbagai contoh bentuk Laporan Keuangan Berbasis Statistik adalah sbb :

1. Laporan Posisi Keuangan Berbasis Statistik

- 1.1. Keterangan judul ; Laporan Posisi Keuangan Berbasis Statistik.
- 1.2. Keterangan mata uang dan besaran nilai; Mata uang negara tsb, dalam Ribu.
- 1.3. Keterangan kolom (satu judul untuk dua kolom):
 - 1.3.1. Judul kolom : Kolom **GGS** untuk dua kolom untuk dua tahun LK
 - 1.3.2. Judul kolom : Kolom **PFC & PNFC** untuk dua kolom untuk dua tahun LK
 - 1.3.3. Judul kolom : Kolom **Eliminasi** untuk dua kolom untuk dua tahun LK
 - 1.3.4. Judul kolom : Kolom **Jumlah W dari G** untuk dua tahun LK
- 1.4. Keterangan lini

1.4.1. Judul lini Aset

1.4.1.1. Lini Aset terbagi menjadi judul rumpun Aset Lancar (*Current Assets*), terbagi menjadi lini tiap jenis Aset Lancar (*Current Assets*), dan lini Jumlah Aset Lancar (*Total Current Assets*, tanpa judul lini).

1.4.1.2. Lini aset terbagi menjadi judul Aset Tidak-Lancar (*Non-Current Assets*), terbagi tiap jenis Aset Tidak-Lancar (*Non-Current Assets*), dan lini Jumlah Aset Tidak-Lancar (*Total Total Current Assets*, tanpa judul lini).

1.4.1.3. Judul lini ; Jumlah Aset (*Total Assets*)

1.4.2. Judul lini Liabilitas

1.4.2.1. Terbagi menjadi judul rumpun Liabilitas Jangka-Pendek (*Current Liabilities*), terbagi menjadi lini tiap jenis Liabilitas Jangka Pendek (*Current Liabilities*), dan lini Jumlah Liabilitas Jangka-Pendek (*Total Current Liabilitas*, tanpa judul lini).

1.4.2.2. Terbagi menjadi judul Liabilitas Jangka-Panjang (*Non-Current Liabilities*), terbagi tiap jenis Liabilitas Jangka-Panjang (*Non-Current Liabilities*), dan lini Jumlah Liabilitas-Jangka-Panjang (*Total Non-Current Liabilities*, tanpa judul lini).

1.4.2.3. Jumlah liabilitas (*Total Liabilities*)

1.4.3. Judul lini ; Net Aset atau Ekuitas (kolom di isi hasil pengurangan Aset dan Liabilitas)

1.4.4. Judul lini ; Aset Neto atau Ekuitas

1.4.4.1. Terbagi menjadi lini Cadangan (*Reserve*).

1.4.2.2. Terbagi menjadi Lini Surplus/Defisit Terakumulasi (*Accumulated Surplus/Deficit*).

1.4.2.3. Lini Jumlah Aset Neto atau Ekuitas (*Total Net Assets or Equity*) (Kolom di bandingkan dengan angka pada lini 1.4.3. di atas).

2. Laporan Kinerja Keuangan Berbasis Statistik-Berdasar Fungsi

2.1. Keterangan judul; Laporan Kinerja Keuangan Berbasis Statistik.

2.2. Keterangan mata uang dan besaran nilai; Mata uang negara tsb, dalam Ribu.

2.1. Keterangan kolom (satu judul untuk dua kolom):

2.1.1. Judul kolom : Kolom **GGS** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.

2.1.2. Judul kolom : Kolom **PFC & PNFC** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.

2.1.3. Judul kolom : Kolom **Eliminasi** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.

2.1.4. Judul kolom : Kolom **Jumlah W dari G** untuk dua tahun LK.

2.2. Keterangan lini

2.2.1. Judul lini Pendapatan (*Revenue*) berdasar fungsi.

2.2.1.1. Lini Pendapatan, terbagi menjadi lini tiap jenis Pendapatan, (misalnya pendapatan pajak, PNBPN, Pendapatan Transfer, pendapatan sektor lain) dan Lini Jumlah Pendapatan.

2.2.1.2. Lini Beban (*Expenses*) terbagi menjadi tiap jenis beban (*expenses*) berdasar fungsi (misalnya Beban Layanan Umum/*General Public Service*, Kesehatan, pertahanan, pendidikan dan tupoksi K/L lainnya), dan lini Jumlah Beban.

2.2.1.3. Judul lini ; Jumlah Surplus/Defisit (*Surpluses/Deficits*) (merupakan pengurangan jumlah pendapatan dan jumlah beban berdasar fungsi).

3. Laporan Kinerja Keuangan Berbasis Statistik-Berdasar Klasifikasi Ekonomi

3.1. Keterangan judul; Laporan Kinerja Keuangan Berbasis Statistik Berdasar Klasifikasi Ekonomi.

3.2. Keterangan mata uang dan besaran nilai; Mata uang negara tsb, dalam Ribu

3.1. Keterangan kolom (satu judul untuk dua kolom):

3.1.1. Judul kolom : Kolom **GGS** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.

3.1.2. Judul kolom : Kolom **PFC &PNFC** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.

3.1.3. Judul kolom : Kolom **Eliminasi** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.

3.1.4. Judul kolom : Kolom **Jumlah W dari G** untuk dua tahun LK

3.2. Keterangan lini

3.4.1. Judul lini Pendapatan (*Revenue*) berdasar Klasifikasi ekonomi, judul sama dengan klasifikasi berdasar fungsi, misalnya pendapatan pajak, PNBPN, Pendapatan Transfer, pendapatan sektor lain.

3.4.1.1. Lini Pendapatan, terbagi menjadi lini tiap jenis Pendapatan berdasar klasifikasi ekonomi, dan Lini Jumlah Pendapatan berdasar klasifikasi ekonomi.

3.4.1.2. Lini Beban (*Expenses*) terbagi menjadi tiap jenis beban (*expenses*) berdasar klasifikasi ekonomi (misalnya Beban Penyusutan AT, beban Bunga, Beban Pegawai, Beban Bantuan Sosial, Hibah, Subsidi, Beban Listrik dan Air), dan lini Jumlah Beban berdasar klasifikasi ekonomi.

3.4.1.3. Judul lini ; Jumlah Surplus/Defisit (*Surpluses/Deficits*) (merupakan pengurangan jumlah pendapatan dan jumlah beban berdasar klasifikasi ekonomi).

4. Laporan Perubahan Aset Neto atau Ekuitas Berbasis Statistik

4.1. Keterangan judul; Laporan Perubahan Aset Neto atau Ekuitas Berbasis Statistik.

4.1. Keterangan mata uang dan besaran nilai; Mata uang negara tsb, dalam Ribu

4.2. Keterangan kolom

4.3.1. Judul kolom : Tiga kolom GGS untuk dua tahun LK, terbagi menjadi kolom Cadangan Revaluasi, kolom Cadangan Translasi Mata Uang, dan kolom Akumulasi Surplus/Defisit.

4.3.2. Judul kolom : PFC dan PNVC, untuk dua tahun LK (dua kolom).

4.3.3. Judul kolom : Eliminasi, untuk dua tahun LK dua kolom).

4.3.4. Judul kolom : Jumlah W dari G, dua kolom untuk dua tahun LK.

4.3. Keterangan lini

4.3.1. Judul lini; Saldo 31 Desember 20X0.

4.3.2. Judul lini; Surplus Revaluasi Properti.

4.3.3. Judul lini; Defisit Revaluasi Investasi.

4.3.4. Judul lini; Beda Translasi Mata Uang.

4.3.5. Judul lini; Untung/Rugi Tak Diakui LO.

4.3.6. Judul lini; Surplus Neto Periode Ybs (kolom ke 3 GGS).

4.3.7. Judul lini; Saldo 31 Desember 20X1

4.3.8. Judul lini; Defisit Revaluasi Properti

4.3.9. Judul lini; Surplus Revaluasi Investasi

- 4.3.10. Judul lini; Beda Translasi Mata Uang
- 4.3.11. Judul lini; Untung/Rugi Tak Diakui LO
- 4.3.12. Judul lini; Defisit Neto Periode Ybs (kolom ke 3 GGS)
- 4.3.13. Judul lini ; Saldo 31 Desember 20X2

5. Laporan Arus Kas Berbasis Statistik

- 5.1. Keterangan judul; Laporan Arus Kas Berbasis Statistik.
- 5.2. Keterangan mata uang dan besaran nilai; Mata uang negara tsb, dalam Ribu.
- 5.3. Keterangan kolom.
 - 5.3.1. Judul kolom : Kolom **GGS** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.
 - 5.3.2. Judul kolom : Kolom **PFC &PNFC** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.
 - 5.3.3. Judul kolom : Kolom **Eliminasi** untuk dua kolom untuk dua tahun LK.
 - 5.3.4. Judul kolom : Kolom **Jumlah W dari G** untuk dua tahun LK.
- 5.4. Keterangan lini
 - 5.4.1. Judul lini Arus Kas Aktivitas Operasi.
 - 5.4.1.1. Terbagi menjadi judul rumpun Penerimaan, terbagi menjadi lini tiap jenis penerimaan operasional, seperti Pajak, Penjualan Barang atau Jasa, Hibah Diterima, Pendapatan Bunga,

Pendapatan Dividen dll, dan lini Jumlah Penerimaan Operasional.

5.4.1.2. Terbagi menjadi lini judul rumpun Pembayaran Operasional, terbagi menjadi lini Gaji, Tunjangan Pensiun, Alat-Tulis Kantor & Supplies, Bunga dibayar, beban layanan publik, dan pembayaran lain, dan lini Jumlah Pembayaran Operasional.

5.4.1.3. Arus Kas Neto Operasional.

5.4.2. Judul lini Arus Kas Aktivitas Investasi.

5.4.2.1. Terbagi menjadi berbagai lini, misalnya Pembelian properti, Hasil Pelepasan Properti, Hasil Pelepasan Investasi, Pembelian Sekuritas Dalam Valas, dll.

5.4.2.2. Arus Kas Neto Aktivitas Investasi.

5.4.3. Judul lini Arus Kas Aktivitas Pendanaan.

5.4.3.1. Terbagi menjadi judul lini seperti Penerimaan Pinjaman, Pembayaran pinjaman, dan lain-lain.

5.4.1.3. Arus Kas Neto Aktivitas Pendanaan.

Uraian tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE GGS –
AS AT DECEMBER 31, 20X2**

(in thousands of currency units)

	GGS		PFC and PNFC		Eliminations		Total W-of-G	
	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1
ASSETS								
Current assets								
Cash and cash equivalents	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Receivables	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Inventories	X	X	X	X			X	X
Prepayments	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Investment	X	X	X	X			X	X
Other current assets	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Non-current assets								
Receivables	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Investments	X	X	X	X			X	X
Investment in other sectors	X	X			(X)	(X)		
Other financial assets	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Infrastructure, plant and equipment	X	X	X	X			X	X
Land and buildings	X	X	X	X			X	X
Intangible assets	X	X	X	X			X	X
Other non-financial assets	X	X	X	X			X	X
	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
TOTAL ASSETS	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
LIABILITIES								
Current liabilities								
Payables	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Short-term borrowings	X	X	X	X			X	X
Current portion of borrowings	X	X	X	X			X	X
Provisions	X	X	X	X			X	X
Employee benefits	X	X	X	X			X	X
Other current liabilities	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

PUBLIC SECTOR

	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Non-current liabilities								
Payables	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Borrowings	X	X	X	X			X	X
Provisions	X	X	X	X			X	X
Employee benefits	X	X	X	X			X	X
Other liabilities	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
TOTAL LIABILITIES	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
NET ASSETS	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
NET ASSETS/EQUITY								
Reserves	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Accumulated surpluses/ (deficits)	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
TOTAL NET ASSETS/ EQUITY	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE GGS -
FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 20X2 - CLASSIFICATION OF FUNCTION OF
GOVERNMENT

(in thousands of currency units)

	GGS		PFC and PNFC		Eliminations		Total W-of-G	
	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1
Revenue								
Taxes	X	X			(X)	(X)	X	X
Fees, fines, penalties	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Revenue from other sectors	X	X	X	X	(X)	(X)		
Transfers from other governments	X	X	X	X			X	X
Other operating revenue	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Total revenue	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Expenses								
General public services	X	X					X	X
Defense	X	X					X	X
Public order and safety	X	X	X	X			X	X
Economic affairs	X	X					X	X
Environmental protection	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Housing and community amenities	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Health	X	X	X	X			X	X
Recreational, cultural and religious	X	X					X	X
Education	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Social protection	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Total expenses	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Surplus/(deficit) for the period	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

STATEMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE GGS -
FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 20X2 – ECONOMIC CLASSIFICATION OF EXPENSE
(Alternative presentation method)

(in thousands of currency units)

	GGS		PFC and PNFC		Eliminations		Total W-of-G	
	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1
Revenue								
Taxes	X	X			(X)	(X)	X	X
Fees, fines, penalties	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Revenue from other sectors	X	X	X	X	(X)	(X)		
Transfers from other governments	X	X	X	X			X	X
Other operating revenue	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Total revenue	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Expenses								
Compensation of Employees	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Use of Goods and Services	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Consumption of Fixed Capital	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Interest	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Subsidies	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Social Benefits	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Other Expense	X	X	X	X			X	X
Total expenses	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Surplus/(deficit)	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X

PUBLIC SECTOR

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS/EQUITY FOR THE GGS -
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 20X2**

(in thousands of currency units)

	GGS			PFC and PNFC	Elimin- ations	Total W-of-G
	Revalu- ation Reserve	Transla- tion Reserve	Accumu- lated Surpluses/ (Deficits)			
Balance at December 31, 20X0	X	(X)	X	X	X	X
Surplus on revaluation of property	X			X		X
Deficit on revaluation of investments	(X)			(X)	X	(X)
Currency translation differences		(X)		(X)		(X)
Net gains and losses not recognized in the statement of financial performance	X	(X)		X	(X)	X
Net surplus for the period			X	X	(X)	X
Balance at December 31, 20X1	X	(X)	X	X	(X)	X
Deficit on revaluation of property	(X)			(X)	X	(X)
Surplus on revaluation of investments	X			X	(X)	X
Currency translation differences		(X)		X		X
Net gains and losses not recognized in the statement of financial performance	(X)	(X)		(X)	(X)	(X)
Net deficit for the period			(X)	(X)	(X)	(X)
Balance at December 31, 20X2	X	(X)	X	X	(X)	X

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

**CASH FLOW STATEMENT FOR THE GGS -
FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 20X2**

(in thousands of currency units)

	GGS		PFC and PNFC		Eliminations		Total W-of-G	
	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1	20X2	20X1
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES								
Receipts								
Taxation	X	X			(X)	(X)	X	X
Sales of goods and services			X	X	(X)	(X)	X	X
Grants			X	X	(X)	(X)	X	X
Interest received			X	X			X	X
Dividends from other sectors to government	X	X			(X)	(X)		
Other receipts	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
Payments								
Employee costs	(X)	(X)	(X)	(X)			(X)	(X)
Retirement Benefits	(X)	(X)	(X)	(X)			(X)	(X)
Suppliers	(X)	(X)	(X)	(X)			(X)	(X)
Interest paid	(X)	(X)	(X)	(X)			(X)	(X)
Dividend to other sectors			(X)	(X)	X	X		
Other payments	(X)	(X)	(X)	(X)	X	X	(X)	(X)
Net cash flows from operating activities	X	X	X	X	(X)	(X)	X	X
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES								
Purchase of plant and equipment	(X)	(X)	(X)	(X)			(X)	(X)
Proceeds from sale of plant and equipment	X	X	X	X			X	X
Proceeds from sale of investments	X	X	X	X			X	X
Purchase of foreign currency securities	(X)	(X)	(X)	(X)			(X)	(X)
Net cash flows from investing activities	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES								
Proceeds from borrowings	X	X	X	X			X	X

PUBLIC SECTOR

DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION ABOUT
THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR

Requirement of disclosure	2013		2012		2011		2010	
	€M	€B	€M	€B	€M	€B	€M	€B
Net cash flows from financing activities	N	N	N	N	€M	€B	N	N
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	N	N	N	N	€M	€B	N	N
Cash and cash equivalents at beginning of period	N	N	N	N	€M	€B	N	N
Cash and cash equivalents at end of period	N	N	N	N	€M	€B	N	N

PENUTUP

IPSAS tentang pelaporan informasi keuangan berbasis LK memberi kelengkapan gambaran umum pemerintahan berbasis statistik. Berbagai pertimbangan penting harus dilakukan pemerintah NKRI agar penggunaan IPSAS 22 dalam ranah akuntansi pemerintahan umumnya, LK Auditan BPK khususnya harus disikapi secara bijak.

Opini WTP dengan demikian mencakupi informasi keuangan berbasis statistik tersebut.

Dengan ingatan tulus kepada tugas koordinasi dan supervisi Tim Kecil Proyek 9 Informasi Keuangan Berbasis Statistik dalam pelaporan LK Konsolidasian Pemerintahan NKRI.

Jan Hs, Koordinator, 26 Februari 2019.

ⁱ Istilah kompilasi berbeda dengan penyarian (mengambil intisari) atau peringkasan, atau mengambil hikmah suatu sumber. Terdapat pekerjaan pengumpulan, seleksi kualitas sumber-data atau data, pengklasifikasian dan pengelompokan sumber-data sebelum disajikan dalam konteks GGC. Kompilasi mungkin pula menggunakan hampiran *data analytics* dalam khasanah *big-data*, yang berbeda dengan proses akuntansi lazim menuju pelaporan LK Pemerintahan sesuai IPSAS atau SAP NKRI.

ⁱⁱ Bedakan **Pelaporan LK** berbasis SAP (wajib melalui proses akuntansi seperti jurnal, buku besar, buku-sub-buku-besar, yaitu pembukuan debgan buku-buku akuntansi) dengan Pelaporan Keuangan versi PKBS (tidak melalui proses akuntansi, tanpa pembukuan dengan buku-buku akuntansi lazim seperti jurnal buku besar dan subsidiary ledger).